



KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## ***JOINT PRESS STATEMENT***

### **PERTEMUAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA**

**Jakarta, Senin, 20 Februari 2012**

1. Pimpinan lembaga-lembaga negara melihat bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian perlu membangun demokrasi yang lebih sehat dengan perlunya etika dan *rule of law*.
2. Nilai-nilai demokrasi bersifat universal antara lain adalah; kesetaraan, penghargaan terhadap HAM, terpenuhinya hak-hak berserikat dan berkumpul, dll. Sistem demokrasi kita pilih karena merupakan amanat Bapak Bangsa Pendiri Republik Indonesia. Dengan landasan UUD 1945, kita membangun demokrasi konstitusional yang memperkuat empat pilar yakni PANCASILA, UUD 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA, DAN NKRI.
3. Pengalaman kita menuju konsolidasi demokrasi yang berkualitas masih diwarnai adanya paradoks demokrasi dari nilai demokrasi konstitusional yang kita dambakan. Sejumlah realitas menunjukkan masih ada kelemahan dalam berdemokrasi salah satunya yakni masih adanya praktek

kekerasan di masyarakat, pragmatisme-transaksional terutama pada pelaksanaan pemilu dan pemilukada, permasalahan-permasalahan institusionalisasi politik yang berpotensi pada munculnya *political distrust*, dll. Dalam konteks ini, Pemerintah dan perangkat lembaga negara dituntut untuk bersikap tegas bersama menegakkan hukum, dan jangan memberikan ruang aksi kekerasan atau anarkisme melanda masyarakat atas nama kebebasan dan demokrasi.

4. Untuk memperbaiki implementasi demokrasi di Indonesia, DPR RI tengah membahas RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana masih ada beberapa hal yang harus disepakati dalam forum Panja, yaitu: ketentuan tentang *parliamentary threshold*; ketentuan konversi suara menjadi kursi; sistem pemilu yang hendak digunakan; dan terkait dengan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI. Tampaknya hal ini harus menjadi perhatian segenap para petinggi partai politik agar dapat mendorong tercapainya kesepakatan atas hal penting tersebut, sehingga hal-hal itu dapat segera terselesaikan selambat-lambatnya akhir Maret 2012, sehingga cukup waktu untuk dilakukan sosialisasi.
5. RUU tentang Pemilu yang sedang dibahas di DPR RI diharapkan mempunyai kelebihan dibandingkan aturan main politik pemilu 2009. Dari segi kesiapan pelaksana pemilu,

diharapkan menutup celah-celah kekurangan praktik Pemilu 2009, yakni: (1) memperbaiki sistem kependudukan dan pendaftaran pemilih (DPT), sehingga tidak ada lagi kekisruhan yang mengurangi kualitas pelaksanaan pemilu atau menjamin hak-hak politik pemilu; (2) menjamin sosialisasi pemilu yang lebih baik, dll.

6. Dari segi praktik pemilu, yakni: (1) lebih menjamin kualitas kompetisi pemilu; (2) memberi kesempatan pada parpol peserta pemilu untuk mengajukan calon-calonnya yang berkualitas; (3) kualitas tata cara pemungutan suara; (4) tata cara penghitungan suara yang lebih pasti dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.
7. Berdasarkan identifikasi umum permasalahan dalam demokrasi dan pelaksanaan pemilu di atas, inti yang harus diperhatikan untuk dibenahi ada 3, yaitu: (1) Regulasi; (2) Aktor; dan (3) Kelembagaan Partai politik. Ketiganya harus menjadi landasan pemikiran dalam memperbaiki demokrasi.
8. Sebagai kesimpulan dan sekaligus harapan dapat disampaikan bahwa:
  - Sistem politik yang ada menghasilkan aturan main yang lebih baik, implementatif, tidak tumpang tindih, dan pasti, sehingga tercapai pemilu yang demokratis untuk menempatkan wakil rakyat yang responsif, menciptakan pemerintahan yang legal sekaligus *legitimate*.

- Dalam membangun demokrasi yang baik, selain perangkat undang-undang yang baik, juga didukung oleh etika agar menghasilkan demokrasi yang lebih bermartabat dan mengarah kepada terciptanya konsolidasi demokrasi.
- Dalam penyusunan undang-undang pemilu, perlu diperhatikan tentang *time line*, untuk menghindari dan memastikan proses penyelesaian sengketa hukum yang terjadi pasca pemilu.
- Pelaksana pemilu (KPU dan BAWASLU) lebih siap, profesional, dan berdaya, sehingga dapat mempersiapkan secara dini berbagai hal baik yang terkait teknis maupun sistem pengelolaan anggaran pemilu dan pengadaan logistik pemilu dalam rangka proses pertanggungjawaban.
- Situasi politik aman terkendali/stabilitas terjaga didukung oleh masyarakat madani/*civil society* yang proaktif dan sinergis.
- Kedewasaan politik tercermin dalam politik sehari-hari menuju praktik Pemilu 2014, termasuk peran media massa yang adil, *fair*, dan edukatif.
- Sinergitas antarlembaga negara dalam menyukseskan Pemilu 2014 yang pada gilirannya akan memperkuat peran dan fungsi masing-masing.

- Adanya apresiasi yang lebih baik lagi dari negara-negara lain terhadap Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.